

IMPLEMENTASI AGENDA WOMEN, PEACE, AND SECURITY DARI UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325 OLEH INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM OPERASI PERDAMAIAN PBB PADA PERIODE PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Djoan Alif Amnestya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Agenda *Women, Peace and Security* oleh Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi perdamaian PBB pada periode pemerintahan Joko Widodo serta dampak yang dirasakan oleh Indonesia atas Agenda WPS tersebut. Agenda WPS merupakan agenda yang terbentuk dari perjuangan perempuan dalam penegakkan hak-hak perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, panggilan untuk membahas Kekerasan Seksual Berbasis Gender pada konflik dan paska konflik, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam keamanan dan perdamaian. Agenda WPS senantiasa dikembangkan dan diperkuat dengan disahkannya resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, *United Nations Security Council Resolution* 1325 merupakan resolusi awal dan pertama kalinya DK PBB mengadopsi resolusi yang sepenuhnya membahas mengenai dampak konflik bagi perempuan dan mengakui peran perempuan dalam pembentukan perdamaian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Data didapatkan dengan melakukan wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalankan implementasi Agenda WPS dengan serius dan berkomitmen tinggi namun ditemukannya hambatan yang membuat pelaksanaan kurang maksimal. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia dari implementasi Agenda WPS yakni menaikkan citra Indonesia di mata Internasional, meningkatkan partisipasi perempuan Indonesia ke dalam pencegahan, penanganan dan penganggulangan konflik, serta membangun komunitas perempuan yang sejahtera.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, Agenda *Women, Peace and Security*, Kebijakan Nasional.

**THE IMPLEMENTATION OF WOMEN, PEACE AND SECURITY AGENDA
FROM UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325 BY
INDONESIA TO IMPROVE WOMEN'S PARTICIPATION ON UNITED
NATIONS PEACE OPERATION UNDER THE PERIOD OF JOKO
WIDODO'S REIGN**

Djoan Alif Amnestya

Abstract

This research aims to understand the implementation of Women, Peace and Security Agenda by Indonesia to improve women's participation on UN peace operation under the reign of Joko Widodo and the impact of the Agenda to Indonesia. WPS Agenda was formed by the struggle of women in uphold women's rights, the elimination of discrimination against women, call for addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) in conflict and post-conflict, and improving women's participation in security and peace. Agenda WPS is constantly being developed through the adoption of resolution by the United Nations Security Council, the UNSC Resolution 1325 is the landmark resolution and the first time that UNSC adopted a resolution which fully discussed about the disproportional impact of conflict for women and acknowledging the critical role of women in peacebuilding. This research uses the methodology of qualitative research with descriptive analysis research type on describing the facts that were found during the research. The data were collected by conducting interviews as primary data and literature study as secondary data. This research shows that Indonesia is highly committed and serious in the implementasi of WPS Agenda but there are obstacles which hinder the optimalization of the implementation. The impact of the implementation of WPS Agenda for Indonesia is the formation of Indonesia's good image in international society, improve and enhance Indonesian women's participation on the prevention, resolution, relief and recovery of conflict, also build a prosperous community of women.

Key words: Gender Equality, the Protection and Empowerment of Women, UNSCR 1325, Women, Peace and Security Agenda, National Policy.